



DIMENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LAMPUNG SEBAGAI MEDIA RESOLUSI KONFLIK

Idrus Ruslan

UIN Raden Intan Lampung
idrus.ruslam@radenintan.ac.id

Abstract

On the one hand, the ethnic and religious diversity of Indonesian society becomes an important capital for nation-building. On the other hand, diversity can be a trigger for conflict among communities that threatens development. Actually, every community group has informal norms that become a reference in social interaction. The informal norm is referred to as local wisdom. This informal norm becomes a social capital to avoid conflict. Local wisdom of the people of Lampung which is presented here is Piil Pesenggiri and Muakhi which both ideally have the value and universal spirit so that can be used as a reference for the people of Lampung. The local wisdom should be actualized not only for the people of ethnic Lampung, but also for the immigrant community (coming from other regions / tribes) in order to be respect and understand the existence of different traditions. This is necessary in order to anticipate misunderstandings that often lead to conflicts that can ultimately harm the community itself. This article is expected to contribute to the development of science, especially in the field of conflict resolution.

Abstrak

Pada satu sisi, keanekaragaman suku bangsa dan agama masyarakat Indonesia menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa. Pada sisi yang lain keanekaragaman tersebut bisa menjadi pemicu konflik antar masyarakat yang mengancam pembangunan. Sebenarnya setiap kelompok masyarakat memiliki norma-norma informal yang dijadikan

acuan dalam interaksi sosial. Norma informal tersebut disebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Norma informal ini menjadi modal sosial agar terhindar dari konflik. Kearifan lokal masyarakat Lampung yang diketengahkan disini yaitu Piil Pesenggiri dan Muakhi yang keduanya secara ideal memiliki nilai dan spirit universal sehingga bisa dijadikan rujukan bagi masyarakat Lampung. Kearifan lokal dimaksud seharusnya teraktualisasi bukan hanya bagi masyarakat yang beretnis Lampung, akan tetapi juga bagi masyarakat pendatang (datang dari daerah lain/suku lain) agar saling menghargai, menghormati dan memahami adanya perbedaan tradisi. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi kesalahpahaman yang tidak jarang berujung pada konflik hingga pada akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang resolusi konflik.

Keyword: *Local Wisdom, Lampung Society, Conflict Resolution*

A. Introduction

Indonesia yang terkenal akan keanekaragamannya (agama, suku, bahasa, budaya, ras, golongan) dan lain-lain merupakan suatu yang tak ternilai harganya. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia disamping memiliki kekayaan alam; hutan, lautan, serta sumberdaya alam lainnya, ternyata juga memiliki kekayaan lain (baca: budaya, tradisi, adat istiadat dan lain-lain). Kekayaan kategori yang kedua ini menunjukkan secara terang benderang bahwa *sunnatullah* betul-betul nyata dan terasa di Tanah Air Indonesia. Namun demikian, berbagai macam kekayaan yang beranekaragam tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan secara *sinergi*, maka dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat banyak, seperti konflik horizontal yang hingga pada akhirnya dapat memunculkan problem tersendiri bagi keberlangsungan hidup (*survive*) manusianya. Dalam konteks ini, konflik yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia; baik yang bernuansa ras, etnis maupun agama – setidaknya ditengarai – terjadi akibat egoisme, eksklusifisme, individualisme serta klaim kebenaran (*truth claim*) yang mewabah dalam pemikiran dan aksi di sebagian kalangan masyarakat. Akibat hal tersebut, individu maupun kelompok manusia seringkali bertindak diluar dan sulit diterima nalar dalam batas-batas kemanusiaan (*humanity*).

Pada sisi lain, secara ideal seharusnya jika keanekaragaman tersebut dapat bersinergi (*simbios mutualism*), maka dapat menjadi sumber kekuatan dan energi positif bagi kemaslahatan manusia, karena merupakan kekuatan dan sebagai modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan

akselerasi pembangunan baik fisik maupun mental secara progresif, tanpa harus di-terupsi oleh konflik yang berlatarbelakang dan bernuansa agama, budaya, suku dan lain-lain.

Menurut Zohar dan Marshall yang dikutip oleh Samsul Arifin, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan manusia, tidak hanya memerlukan modal ekonomi (*economic capital*), akan tetapi juga memerlukan modal sosial (*social capital*)¹, tetapi juga modal spiritual (*spiritual capital*)². Meskipun modal sosial dan spiritual tidak berbentuk barang dalam arti ekonomi, tetapi tidak boleh dipandang tidak memiliki manfaat ekonomi.³

Dalam konteks ini, menurut Fukuyama bahwa modal sosial merupakan seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh individu maupun kelompok yang dapat menjadikan mereka untuk saling bekerjasama.⁴ Unsur-unsur pokok modal sosial itu sendiri yaitu; kepercayaan (*trust*), jaringan dan norma. Kepercayaan merupakan dimana masyarakat memiliki sikap saling mempercayai, sehingga dengan demikian mereka dapat. Sikap saling percaya yang dimiliki masyarakat, merupakan modal bagi masyarakat tersebut untuk dapat membangun suatu jaringan sosial dengan prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Adapun norma, merupakan seperangkat aturan yang berlaku dan harus dijalankan secara konsisten oleh masyarakat.⁵ Oleh karena itu, pengelolaan secara massif dan dilakukan secara bersinergi terhadap modal sosial dalam pengertian tersebut sangatlah menjadi penting.

Pada sekelompok masyarakat yang memiliki secara bersama norma informal, dimana norma tersebut dijadikan sebagai acuan atau pandangan untuk menjalin kerjasama dan berinteraksi meskipun memiliki berbagai macam perbedaan latarbelakang, - jika merujuk pada penjelasan tersebut diatas – maka itulah yang disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang

¹Modal sosial yaitu kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama.

²Sedangkan modal spiritual, merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara substansi.

³Samsul Arifin, *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-Isu Kontemporer* (Malang: UMM Press, 2009), h. 77. Fukuyama dalam bukunya yang sangat berpengaruh, *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order (1999)*, memberikan penegasan bahwa modal sosial memberikan manfaat yang lebih luas daripada bidang ekonomi.

⁴*Ibid.*, h. 78

⁵*Ibid.*

sesungguhnya dapat menjadi modal sosial dan berguna bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.

Masyarakat Lampung juga memiliki kearifan lokal yang jika dipahami, dikembangkan serta diaktualisasikan, maka tentu saja dapat dijadikan sebagai alternatif solusi dalam menghindari munculnya konflik. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu budaya *Piil Pesenggiri* dan budaya *Muakhi* yang semuanya itu idealnya berjalan secara bersamaan, artinya pemahaman secara utuh dan konkret terhadap kedua kearifan lokal dimaksud, bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang beretnis Lampung, akan tetapi juga bagi masyarakat pendatang, menjadi suatu yang mutlak. Hal ini menjadi penting, karena Lampung merupakan provinsi yang plural dimana dengan letaknya sebagai “Serambi Sumatera” sehingga sangat memungkinkan bagi berbagai etnis maupun agama untuk menetap dan berkembang di Provinsi ini. Hal tersebut sesuai dengan fakta bahwa di Lampung terdapat banyak etnis seperti Jawa, Sunda, Bali, Padang, Palembang, Medan dan lain sebagainya serta agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang kesemuanya mengalami pertumbuhan serta interaksi yang cukup signifikan dan dinamis.

Dengan keaneragamannya pula, maka perkembangan pembangunan di Lampung seharusnya lebih dinamis, sebab banyak komunitas yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Pernyataan tersebut tentu dapat dipahami sebagai suatu logika bersama bahwa; suatu problem atau permasalahan akan lebih mudah untuk di carikan solusinya, manakala manusia yang memberikan kontribusi terhadap pemecahan problem tersebut pun banyak, ketimbang yang hanya diselesaikan oleh segelintir orang.

B. Sekilas Tentang Kearifan Lokal Masyarakat Lampung

Sebelum mendiskusikan tentang kearifan lokal masyarakat Lampung, terlebih dahulu perlu diketengahkan tentang pengertian kearifan lokal itu sendiri. Secara etimologis, kearifan (Inggris: *wisdom*) yaitu kemampuan individu menggunakan akal pikirannya dalam merespon suatu obyek, keadaan, peristiwa atau pun kejadian. Sedangkan lokal, merupakan ruang atau juga tempat terjadinya interaksi. Dengan begitu dapat dipahami bahwa substansi kearifan lokal adalah nilai dan norma yang berlaku dan diyakini serta menjadi acuan dalam bertindak pada suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan pemberdayaan potensi nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur dan mengandung

kebaikan secara arif dan bijak guna kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Selain itu, kearifan lokal dapat juga didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal (baca: bukan dari luar) yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup.

Di Indonesia—yang kita kenal sebagai Nusantara—kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu saja, akan tetapi dapat bersifat lintas budaya (*cross culture*) atau lintas etnik (*cross ethnic*) sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Misalnya, hampir di setiap budaya lokal Indonesia mengajarkan kearifan lokal dalam bentuk gotong royong, toleransi, musyawarah, kerjasama, dan lain sebagainya, dimana pada umumnya nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip.⁶

Kearifan lokal yang diyakini memiliki nilai kebaikan dan menjadi acuan dalam bertindak pada kehidupan masyarakat, sehingga prinsip tersebut menjadi pola pikir dan tradisi pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun terdapat perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, akan tetapi dalam kurun waktu yang lama, mereka terikat dalam persamaan visi dan persepsi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Dalam perspektif ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang telah disepakati secara bersama. Perlu ditambahkan, meskipun kearifan lokal memiliki nilai dan sifat lokal sesuai dengan sebutannya, akan tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dapat bersifat universal, artinya bisa dijadikan landasan berpikir, bersikap dan bertindak bagi suatu komunitas lain yang berbeda tempat maupun asal, yang hidup bersama dalam suatu daerah.

Masyarakat Lampung memiliki kearifan lokal unik yang disebut dengan *Piil Pesenggiri*, dimana di dalamnya terkait soal kehormatan diri yang muncul karena kemampuan mengolah pikiran dan berperilaku secara dewasa. Dalam konteks ini, kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai kalangan, termasuk pendatang, merupakan salah satu prinsip dari inti ajaran *Piil Pesenggiri*.

⁶Suyono Suyatno, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1336/artikel/1336> (diunduh pada 9 September 2016)

Terminologi *Piil Pesenggiri* berasal dari dua kata yaitu kata *Piil* dan *Pesenggiri*. Menurut Ahmad Zarkasi, kata *Piil* berasal dari kata *Fi'il* dalam bahasa Arab yang berarti “perbuatan, perangai, perilaku. Adapun kata *Pesenggiri* berasal dari kata *pusenggekh* yang berarti simpang siur atau pertemuan disatu titik pada saat simpang siur, atau dengan kata lain “pertemuan sejajar pada garis lurus”. Dengan demikian *Piil Pesenggiri* dapat dimaknai sebagai perilaku orang yang beretnis Lampung yang dalam kehidupan bermasyarakat selalu ingin sejajar dengan orang lain.⁷ Akan tetapi kata sejajar dalam kalimat diatas hendaknya tidak dimaknai secara negatif, sebaliknya memiliki konotasi positif yakni prinsip kesetaraan atau kesejajaran.

Pada sisi lain, Ratnawati memberikan arti *Piil Pesenggiri* sebagai “prinsip hidup orang Lampung yang ingin sejajar, berdampingan dengan orang lain”.⁸ Dalam konteks ini, pada hakikatnya orang Lampung tidak ingin berada diatas, sementara yang lain berada di bawah, atau sebaliknya tidak ingin dibawah sementara yang lain diatas. Berdasarkan penegasan tersebut, ditemukan bahwa prinsip hidup orang Lampung yang memiliki prinsip kesejajaran (*equality*).

Piil Pesenggiri merupakan suatu keutuhan dari empat unsur yaitu; *Juluk adek/adok*, *nemui nyimah*, *nengah nyappukh*, dan *sakai sambayan*. Keempat unsur tersebut merupakan modal dasar dan sebagai penyangga seseorang untuk menegakkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang dapat dikatakan *Bupiiil Bupesenggiri* jika ia telah menjalankan nilai-nilai pada keempat unsur dimaksud.

Unsur-unsur *Piil Pesenggiri* adalah selalu berpasangan, yaitu *Juluk* berpasangan dengan *Adek*, *Nemui* berpasangan dengan *Nyimah*, *Nengah* berpasangan dengan *Nyappukh*, dan *Sakai* berpasangan dengan *Sambai*. Gabungan atau pasangan tersebut itu bukan tanpa sebab dan hampa makna, sebab jika dilihat dari esensi dan hakikatnya maka akan timbul pemahaman bahwa memang seharusnya demikian. Dalam hal ini, *Juluk Adek* bermakna bahwa dalam kehidupan hendaklah terprogram, agar mencapai keberhasilan, lalu prinsip *Nemui Nyimah* merupakan prinsip ramah, terbuka dan saling menghargai terhadap orang lain termasuk juga pendatang atau tamu, kemudian prinsip *Nengah Nyappukh* yaitu prinsip suka bergaul,

⁷Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung (Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal)*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2014), h. 71.

⁸Ratnawati, *Pengkajian Nilai-Nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), h. 2.

terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat, atau dengan kata lain menolak sikap individualisme, dan *Sakai Sambayan* yaitu prinsip kerjasama, atau kebersamaan dalam bermasyarakat tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki.

Unsur-unsur *Piil Pesenggiri* itu tentu bukan sekedar prinsip yang kosong dan hampa dari nilai-nilai (hakikat), melainkan mempunyai nilai-nilai nasionalisme budaya yang luhur yang perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejatinya *Piil Pesenggiri*, tidak diungkapkan dan diartikan sebagai pemujaan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain atau dengan mengagungkan seseorang yang jauh lebih unggul dari orang lain, atau juga menyengsarakan orang lain untuk membahagiakan seseorang. Seorang yang memiliki harga diri akan lebih bersemangat (memiliki etos kerja yang kuat), lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan secara arif dan dewasa, serta merasa sejajar dengan orang lain (tidak rendah diri).

Selain budaya *Piil Pesenggiri*, ada suatu kearifan lokal yang bisa dikembangkan dalam rangka menjawab pluralitas kehidupan sosial keagamaan di Lampung yakni budaya *Muakhi*. Secara bahasa kata *muakhi* bisa dimaknai sebagai ikatan persaudaraan manusia yang hidup bertetangga. Asal kata *muakhi* yaitu *Puakhi* artinya saudara sekandung, saudara sepupu dari garis pihak bapak maupun ibu. Kata *Muakhi* juga berasal dari kata bahasa Arab yaitu *akhun* yang berarti saudara, dan *ukhwah* artinya ikatan persaudaraan atas dasar kesamaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pengertian *muakhi* yaitu kehidupan kelompok masyarakat yang diikat dengan kesamaan iman merupakan saudara, dalam arti satu umat.⁹

Merujuk pada pengertian tersebut, maka menjadi terang benderang bahwa budaya *muakhi* merupakan salah satu budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Lampung, memiliki “pesan” untuk bersaudara meskipun memiliki perbedaan latar belakang (etnis, budaya, ras, juga agama dan lain-lain). Dengan “bersaudara”, maka seseorang/kelompok akan dengan senang hati dan suka rela untuk saling membantu, menerima dan tolong menolong baik terhadap kelompoknya sendiri maupun terhadap kelompok masyarakat lain secara konstruktif dan berkualitas.

⁹A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 91.

Spirit universal yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Lampung diatas seharusnya teraktualisasi bukan hanya bagi masyarakat yang beretnis Lampung, akan tetapi juga bagi masyarakat pendatang (datang dari daerah lain/suku lain) agar supaya dapat saling menghargai, menghormati dan memahami adanya perbedaan tradisi. Dengan adanya kesaling pemahaman dimaksud, maka tidak muncul kesalah pemahaman. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi kesalahpahaman yang tidak jarang berujung pada konflik hingga pada akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri, serta Pembangunan Daerah menjadi terhambat.

C. Kearifan Lokal Sebagai Media Resolusi Konflik

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri – Dino Pati Jalal – yang bertindak sebagai *keynote speech* pada acara *Opening Ceremony Mahathir Global Peace School (MGPS) III: Interstate Relation and Global Justice for Peace and Conflict Resolution* yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2014 menegaskan bahwa konflik yang sering melanda negeri ini, dapat diberikan jalan keluar dengan menggunakan instrumen kearifan lokal yang ada di Indonesia.

Statemen tersebut setidaknya menjadi renungan bersama bahwa ada kealfaan negara selama ini dalam melakukan penyelesaian konflik, yang hanya menggunakan pendekatan keamanan atau militer. Sebab Indonesia adalah bangsa yang plural dan akibat dari tuntutan hidup, maka terjadinya percampuran budaya antar suku dimana dalam praktik percampuran tersebut tidak sedikit yang mengabaikan nilai-nilai atau norma lokal yang telah ada dan berkembang pada suatu masyarakat. Akibatnya terjadi persinggungan yang jika tidak atau terlambat mengantisipasinya dapat menimbulkan konflik horizontal yang semakin parah.

Jika sebelumnya pendekatan yang digunakan adalah bersifat umum dan teoritis, yang bersumber dari hasil suatu kegiatan seminar, diskusi dan lain sebagainya atau juga berdasarkan pengamatan terhadap kejadian yang pernah terjadi di Negara lain yang tentu semua itu agak sukar untuk diterapkan, hal tersebut dikarenakan tidak sedikit dimensi lain yang sukar dikoneksikan apalagi menyangkut nilai-nilai, norma-norma, budaya, kondisi geografis dan konteks lokal yang telah ada dan berkembang pada suatu kelompok masyarakat.

Secara teoritis Atho Mudzhar menjelaskan bahwa ada empat faktor yang bertemu pada waktu yang bersamaan pada konflik yang terjadi. Keempat faktor tersebut yaitu *facilitating contexts* (kontek pendukung),

core (root) of konflik (akar konflik), *fuse factors* (faktor sumbu), dan *triggering factors* (faktor pemicu).¹⁰

Konteks pendukung (*facilitating contexts*) dalam suatu konflik dapat berupa bentuk pekerjaan atau pemukiman yang berbeda berdasarkan latar belakang keagamaan ditempat masyarakat yang mengalami konflik, atau dapat juga berupa tingkat persaingan jumlah penganut agama, serta urbanisasi yang berimplikasi pengusuran terhadap penduduk asli (lokal) disuatu daerah tertentu dan lain sebagainya. Pada konteks ini dapat diumpamakan sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Maluku, Ambon khususnya. Konteks ini pula memiliki kaitan dengan tumbuhnya potensi-potensi konflik, hanya saja tidak mengakibatkan terjadinya konflik secara spontan.

Sedangkan *Core of conflict* (akar konflik), merupakan suatu tingkat penderitaan sosial yang ditimbulkan akibat terjadinya marginalisasi sosial yang disebabkan oleh perebutan sumber-sumber daya (*resources*) maupun kekuasaan (*power*). Dalam konteks ini, misalnya penguasaan sebagian lahan dan hasil pertanian atau pun jabatan-jabatan publik dalam waktu yang cukup lama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok lainnya. Jika suatu kelompok yang menguasai tersebut berasal dari kelompok agama tertentu maka konflik yang terjadi dapat pula bernuansa agama.

Adapun *Fuse factor* (faktor sumbu), yaitu berupa sentimen suku, ras, agama dan antargolongan yang biasanya sebagai bibit-bibit konflik memang telah ada disuatu daerah tertentu, akan tetapi tidak secara otomatis mengarah menjadi konflik jika tidak terpancing atau dipancing.

Lalu *Triggering factors* (faktor pemicu) merupakan peristiwa atau momentum dimana semua elemen yang ada pada masyarakat mengarah pada konflik sosial. Momentum itu terjadi hanya karena persoalan sepele dan remeh seperti pertengkaran mulut atau perkelahian kecil antara dua individu maupun kelompok, akan tetapi dapat menjadi alat pembenar bagi terjadinya konflik dalam bentuk yang lebih besar.¹¹

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa dampak suatu konflik bergantung pada tataran apa akar konflik itu berada dan terjadi. Jika akar konflik berada pada tataran instrumental, biasanya konflik itu akibatnya

¹⁰M. Atho, Mudzhar, "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama", dalam Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003), h. 5.

¹¹*Ibid*, h. 5-6.

tidak terlalu luas dan dapat segera berhenti. Tetapi jika akar konflik itu berada pada tararan ideologi, biasanya akibatnya lebih besar bahkan mengerikan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam konflik (agama), pelaksanaannya bisa sangat destruktif dan tidak mengenal belas kasihan, karena pelakunya merasa melakukan hal itu bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, melainkan untuk sesuatu tujuan abstrak yang dipandang lebih tinggi dan mulai.¹²

Dengan menggunakan teori diatas, kita dapat memetakan konflik-konflik yang terjadi selama ini terutama di Lampung; seperti di Lampung Tengah, Lampung Selatan (Kalianda) dan daerah lainnya. Tetapi itu semua hanya berguna dalam rangka mencari akar atau bentuk-bentuk suatu konflik dimana konflik itu sendiri telah terjadi yang menyisakan penderitaan baik secara fisik maupun psikis.

Persoalan pemetaan konflik amatlah berguna, tetapi tentu saja yang lebih penting dan mendesak adalah bagaimana supaya konflik yang terjadi di masyarakat bisa dicarikan jalan keluar (solusi), agar konflik yang sedang terjadi bisa diselesaikan sedini mungkin sehingga tidak merembet menjadi lebih besar lagi, atau juga bisa dijadikan sebagai sarana antisipasi jika dirasa sudah terdapat tanda-tanda dimana akan terjadinya konflik. Salah satu cara dalam melakukan resolusi konflik ditengah masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal.

Sesungguhnya di berbagai daerah di Indonesia telah terbukti bahwa eksistensi kearifan lokal turut ambil bagian dalam mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap konflik. Sebut saja misalnya tradisi Rumah Betang di Kalimantan Tengah, Subak di Bali, dan Pela di Ambon atau juga di daerah-daerah lain. Ketiga bentuk tradisi kearifan lokal dimaksud dalam prakteknya turut mewarnai suasana kehidupan yang rukun serta dapat mengantisipasi konflik, karena tradisi tersebut meskipun awalnya hanya berlaku bagi suatu komunitas yang homogen, akan tetapi dalam perkembangannya dapat pula menerima kelompok lain diluar komunitasnya. Hal ini sebagaimana yang diuraikan oleh A. Sutarmadi dalam penelitiannya bahwa rumah betang pada awalnya merupakan tradisi dayak yang berkepercayaan khas. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, sehingga interaksi dengan komunitas dan etnis lain menjadi sulit untuk dihindari, hingga akhirnya datang agama lain seperti Islam, Hindu, Budha,

¹²Lihat misalnya Lester Kurtz, *Gods in the Global Village* (California-London-New Delhi: Pine Forge Press, 1995), h. 212.

Kristen dan Katolik. Kedatangan agama dimaksud dalam lingkungan Rumah Betang diterima dengan penuh keterbukaan.¹³

Begitu juga dengan tradisi Subak di Bali. Subak merupakan sistem pengairan yang turut berkontribusi dalam mengantisipasi masalah konflik, karena anggota dari Subak itu sendiri berasal dari berbagai komunitas dan agama. Selain itu, Subak di Bali terstruktur sedemikian rupa sehingga terdapat kepengurusan yang jelas, serta memiliki sistem piket secara bergantian. Dengan pola ini dapat menyatukan ikatan kekerabatan atau memiliki kedekatan hati, serta saling menghargai juga dapat saling membantu meskipun berbeda agama sehingga dapat mengantisipasi munculnya konflik.¹⁴

Sedangkan Pela merupakan tradisi kearifan lokal yang berasal dari Ambon. Menurut Frank L. Cooley bahwa Pela adalah ikatan persahabatan atau persaudaraan yang disepakati oleh seluruh penduduk yang ada di suatu desa. Ikatan tersebut telah ditetapkan oleh para leluhur secara khusus dan menyampaikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban bagi masyarakat yang masuk dalam komunitas Pela.¹⁵

Dalam salah satu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Husain ditemukan bahwa tradisi Pela merupakan cara tradisional yang telah berkembang di Ambon dan dilakukan secara turun menurun dalam rangka melakukan interaksi sosial. Perlu diketahui bahwa dalam tradisi Pela ini terkandung didalamnya nilai-nilai persaudaraan, kerjasama dan tolong menolong dengan tidak terikat perbedaan suku, bahasa maupun agama.¹⁶

Terkait dengan kontribusi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, setidaknya dapat dilihat yaitu; *Pertama*, kearifan lokal dapat diartikan sebagai pedoman perilaku baik bagi individu/kelompok. Hal ini bisa dilihat dari nilai kearifan lokal sebagai pedoman atau acuan perilaku baik yang dapat digunakan ketika berinteraksi kepada masyarakat; dalam arti menahan ambisi, egoisme, a-sosial dan lain sebagainya agar bersikap toleran

¹³A. Sutarmadi, "Rumah Betang Simbol Kerukunan Hidup Umat Beragama", dalam Sudjangi (Peny.), *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama; Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Agama, 1997), h. 9.

¹⁴Ida Bagus Dharmika, "Kerukunan Hidup Beragama: Studi Kasus di Subak Medewi Jembrana Bali", dalam Sudjangi (Peny.), *Ibidh.* 49.

¹⁵Cooley, Frank L. (1987). *Mimbar dan Tahta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 183.

¹⁶Hamadi B. Husain, "Kerukunan Umat Beragama dan Pela di Maluku", dalam Sudjangi (Peny.), *Op.Cit.*, h. 89.

sehingga dapat menyingkirkan perilaku yang dapat menyakiti perasaan, menyinggung, mengalahkan, dan bahkan menghinakan orang lain; sehingga cikal bakal konflik dapat minimalisir dengan cara aktualisasi nilai-nilai universal dan transformatif dari kearifan lokal.

Kedua, kearifan lokal diartikan sebagai dasar modal sosial untuk menuju kohesi sosial. Hal ini tentu saja dikarenakan kearifan lokal merupakan sumber norma kebaikan, sehingga masyarakat yang menjalankannya pun penuh keikhlasan dan kerelaan. Jika telah demikian, maka individu atau kelompok yang mengaktualisasikannya pun bisa disebut sebagai koordinator dalam mewujudkan orientasi kehidupan bersama yakni kehidupan yang aman dan rukun serta penuh dengan keharmonisan. Suasana hidup yang harmonis merupakan bentuk dari kohesi sosial, karena bentuk ini sangat mengedepankan kesetaraan, inklusivitas, kebersamaan yang berlawanan arah bagi munculnya konflik. Dengan demikian, maka sangat layak untuk menjadikan kearifan lokal sebagai modal sosial, karena sesungguhnya modal sosial memiliki signifikansi dan urgensi yang setara dengan modal-modal lain Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya dalam mengelola tatanan kehidupan ini.

Ketiga, kearifan lokal diartikan sebagai praktek teknis penyelesaian konflik dan kekerasan. Sejumlah tatanan lokal mengembangkan praktek teknis resolusi konflik dan kekerasan. Dalam konteks ini dapat dilihat dari berbagai kebiasaan daerah yang apabila terjadi keributan baik itu terjadi seperti masalah-masalah kenakalan remaja dan lain sebagainya. Ketika suatu keributan atau konflik tersebut terjadi, maka satu pihak segera membawa panganan tradisional, seperti beras, kelapa, gula, susu, rokok dan lain-lain kepada pihak yang – sebut saja – mengalami penderitaan akibat konflik, maka saat itu konflik dapat segera di damaiakan karena pihak yang dikunjungi merasa dihormati dan dihargai oleh pihak yang membawa panganan tadi.¹⁷

Selain itu, dalam konteks kontribusi kearifan lokal sebagai media resolusi konflik dapat pula dilihat bahwa: *Pertama*, kearifan lokal merupakan identitas khas bagi sebuah komunitas sekaligus menunjukkan bahwa komunitas tersebut adalah komunitas yang memiliki budaya dan berperadaban. Ketika sebuah komunitas yang hidup secara beradab, maka tentu sangat menjauhi munculnya konflik, karena konflik identik dengan budaya yang tidak beradab. Atau dengan kata lain, sebuah masyarakat yang

¹⁷Amien, *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru* (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 25.

mengaktualisasikan kearifan lokalnya secara rela, maka sesungguhnya komunitas tersebut ingin mendeklarasikan bahwa masyarakatnya adalah sebuah masyarakat yang mencintai perdamaian, bukan sebaliknya.

Kedua, dalam kearifan lokal sesungguhnya terdapat aspek perekat atau pemersatu yang melampaui batas-batas agama, kepercayaan, ras, suku, kelompok dan lain-lain. Dengan kata lain, kearifan lokal juga dapat dipersepsikan sebagai tempat, ruang maupun arena dialog dalam rangka mengurangi segala macam bentuk tensi klaim kebenaran dan eksklusivitas politik identitas yang mewabah pada berbagai macam kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dengan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal, dapat dijadikan sebagai upaya menjembatani berbagai macam kepentingan yang ada di masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik, agar tidak berubah menjadi lebih besar.

Ketiga, resolusi konflik yang berdasarkan kearifan lokal lebih bersifat persuasif karena penerapannya secara perlahan dan menyentuh ke hati dan pikiran masyarakat dengan mengambil contoh-contoh dalam praktik kehidupan yang lebih baik. Berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik, karena penerapannya cenderung memaksa, tanpa memperhatikan aspek psikologis individu maupun kelompok masyarakat yang sedang mengalami konflik.

Keempat, kearifan lokal merupakan *mindset* juga *way of life* bersama sehingga menjadi milik dan kebanggaan bersama, sehingga menimbulkan dan memacu rasa kebersamaan, dan saling menghargai, sekaligus sebagai sebuah mekanisme dalam menangkal “serangan” yang dapat melemahkan, bahkan merusak solidaritas komunal, yang tumbuh dan berkembang diatas dasar kolektivitas sebuah komunitas.

Kelima, sebagai sebuah *mind set* bersama, maka kearifan lokal dapat merubah pola pikir dan hubungan timbal balik antar individu dan kelompok. Dengan demikian, dapat disebut bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang bertujuan sebagai sebuah kohesi relasi antar sesama masyarakat yang kadangkala terabaikan akibat terjadi perbedaan kepentingan, ekonomi, politik maupun status sosial.¹⁸

¹⁸John Haba, “Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso”, dalam Irwan Abdullah dkk. (ed.), *Agama dan kearifan Lokal Dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 334-335.

Semakin jelas bahwa sesungguhnya kearifan lokal dapat dijadikan sebagai opsi dalam resolusi konflik komunal pada masyarakat yang heterogen. Beragam nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi sebagai budaya perdamaian juga turut andil memberikan kontribusi dalam menjaga solidaritas, kohesivitas dan harmoni antar elemen yang melekat pada masyarakat, seperti agama, budaya, suku, kepercayaan dan lain sebagainya. Karena nilai dan praktek kearifan lokal tersebut sesungguhnya bersifat etis, luhur dan universal. Nilai-nilai bersosialisasi, menghormati, bergotong royong, bersatu, berkeadilan serta persaudaraan dalam kearifan lokal masyarakat Lampung adalah sesuatu yang luhur dan bisa dipandang sebagai modal sosial. Oleh karena itu, modal sosial tersebut yang terumuskan sebagai konsep natural atau alamiah yang muncul dalam masyarakat yang berbudaya, tentu saja sangat patut diwarisi dan dikembangkan sebagai sebuah keunggulan lokal (*local genius*) yang dapat berguna sebagai resolusi konflik, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merealisasikan pembangunan yang kreatif dan partisipatif.

D. Komitmen Bersama

Sosiolog kenamaan – Talcott Parsons – mengatakan jika suatu bangsa (daerah) ingin tetapi eksis, maka setidaknya harus memiliki empat paradigma fungsi yaitu *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latent pattern-maintenance* (AGIL). *Adaptation* berarti kemampuan masyarakat yang ada dalam suatu bangsa untuk beradaptasi atau membaur antar sesama masyarakat itu sendiri. Adapun *Goal attainment* berarti masyarakat dalam suatu bangsa haruslah memiliki orientasi atau tujuan, karena dengan tujuan itulah maka masyarakat akan menjadi dinamis serta memiliki spirit yang kuat untuk memajukan bangsanya. Sedangkan *Integration* yaitu kemampuan masyarakat untuk selalu berintegrasi atau bersatu sehingga setiap apa yang dicita-citakan dapat terealisasi yang dibaluti semangat persatuan. Dan *Latent pattern-maintenance* berarti kemampuan masyarakat untuk menjaga, merawat dan melestarikan berbagai macam bentuk norma-norma dan aturan-aturan yang telah disepakati sebagai *word view* bersama.¹⁹

¹⁹Talcott Parsons, “Teori Sistem Umum: Suatu Gerakan ke Arah Kesatuan Teori Ilmu Perilaku”, dalam Margareth M. Poloma (ed), *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasagama (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 180-181. Penjelasan tentang teori AGIL Parsons ini dapat dilihat juga pada George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2012), h. 121.

Teori Parsons tersebut – jika ditarik dalam konteks wilayah Lampung – setidaknya mengingatkan kepada masyarakat Lampung akan pentingnya kemampuan beradaptasi, baik terhadap individu/kelompok lain serta beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan dunia yang begitu pesat yang berarti harus dapat mengambil nilai kebaikan dari adanya perubahan peradaban dunia. Selanjutnya masyarakat yang *nota bene* adalah hidup dalam suatu wilayah/daerah, selayaknya memiliki tujuan bersama. Hal ini sangat penting, karena apabila muncul ketidak sepakatan terhadap sebuah tujuan bersama, maka akan menimbulkan konflik, dan pertikaian pada masyarakat yang tentu saja hal tersebut akan sangat merugikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, dengan adanya tujuan bersama, masyarakat akan memiliki spirit dan motivasi yang kuat dari waktu ke waktu untuk menjadikan kehidupan mereka secara damai.

Aspek lain yang diperlukan adalah terbangunnya integrasi berdasarkan kesadaran yang tinggi tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang masing-masing, apalagi bagi masyarakat yang plural. Suatu integrasi yang dibangun bersama-sama tersebut dalam konteks wilayah Lampung merupakan sebuah pandangan hidup (*world view*) yang dijadikan rujukan bersama karena nilai-nilainya bersifat mendasar dan universal serta bersifat egaliter atau kesederajatan. Rujukan bersama tersebut tidak lain ialah kearifan lokal.

Lalu yang terakhir adalah kemampun masyarakat memelihara perilaku budaya yang telah tertanam secara berurat dan berakar dalam jiwa sanubari masyarakat Lampung. Perilaku budaya yang dimaksud adalah seperti gotong royong, musyawarah, tolong menolong, toleransi dan saling menghargai serta berkepercayaan terhadap sesuatu yang menguasai alam semesta. Perilaku budaya tersebut tidak boleh bergeser menjadi perilaku budaya yang tidak sesuai apalagi bertentangan dengan perilaku budaya semula seperti egoisme, individualisme, sekulerisme, materialisme dan lain sebagainya yang sama sekali bukanlah merupakan warisan para leluhur kita. Sebab jika terjadi suatu perubahan dengan perilaku budaya lain yang asing, hal itu berarti disatu sisi, telah menyebabkan teralienasinya perilaku budaya lama yang telah diwariskan secara turun menurun oleh para tokoh adat Lampung. Sedangkan disisi lain, sangat boleh jadi perilaku budaya lain yang dianggap baru tersebut tidak sesuai dengan watak dan karakter masyarakat Lampung bahkan malah bertentangan bertentangan, sehingga mencitrakan manusia yang memiliki watak dan karakter negatif, karena tidak sesuai lagi dengan citra budaya awalnya.

Oleh karena itu yang diperlukan adalah adanya komitmen bersama (masyarakat asli dan pendatang) dalam mewujudkan kearifan lokal Lampung sebagai sesuatu yang bermanfaat serta menjadi paradigma berpikir dan bertindak, agar supaya konflik diwilayah ini dapat dieleminir. Kearifan lokal bukanlah suatu yang hampa dan kosong tanpa makna, akan tetapi terkandung nilai-nilai etik, spirit perjuangan dan mempertahankan hidup, egalitarianisme, kolektivisme, tolong menolong yang berlaku secara universal.

Adanya komitmen bersama dalam mengaktualisasikan kearifan lokal masyarakat Lampung menjadi sesuatu yang mendesak, sebab nilai-nilai dan norma yang sejatinya bersifat luhur tersebut akan memiliki nilai manfaat, manakala adanya kesanggupan secara komit dari masyarakatnya untuk menjadikan kesemuanya itu sebagai etika dan rujukan dalam berinteraksi. Jika tidak memiliki komitmen, maka nilai-nilai kearifan lokal tersebut hanya menjadi hiasan yang tersimpan dalam etalase.

Di Lampung terdapat tradisi kearifan lokal – sebagaimana yang telah dieksplorasi sebelumnya – yang sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai instrumen resolusi konflik. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak orang (baik yang beretnis Lampung apalagi yang bukan beretnis Lampung) belum memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap pengertian dari kearifan lokal masyarakat Lampung yakni *Piil Pesenggiri* dan *Muakhi*. Menurut Aqil Irham hal tersebut disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Problem dari dalam (kekeliruan orang yang beretnis Lampung) dalam memaknai *Piil Pesenggiri*, disebabkan; karena terdapat kesenjangan antara generasi muda dengan generasi tua (khususnya sesepuh adat, punyimbang dan keluarga), sehingga terjadi ketersumbatan dari generasi tua untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan makna yang utuh dari konsep *Piil Pesenggiri* tersumbat. Faktor selanjutnya adalah, usaha aktualisasi dan re-interpretasi makna *Piil Pesenggiri* tersebut dalam konteks perubahan sosial sekarang yang mengarah pada pengembangan masyarakat dirasa masih kurang. Lalu faktor yang terakhir, pudarnya nilai-nilai budaya warisan yang dimiliki oleh masyarakat etnis Lampung, padahal hal tersebut sangatlah berharga.²⁰

²⁰Muhammad Aqil Irham, *Falsafah Piil Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global (Studi Hubungan Nilai-nilai Budaya dan Agama)*, (Bandar Lampung, Puslit IAIN Raden Intan Lampung, 1997), h. 45-46.

Sedangkan problem dari luar (masyarakat etnis non-Lampung) adalah masih terjadi salah persepsi tentang falasah hidup (kearifan lokal) termasuk budaya muakhi yang dianggap hanya sekedar mengedepankan aspek prestise dan gengsi. Padahal kearifan lokal dimaksud jika dipahami dengan seutuhnya dapat digunakan sebagai media kohesi sosial baik intern masyarakat etnis Lampung maupun masyarakat etnis selain Lampung. Penggunaan term etnis Lampung dan non etnis Lampung tidak dimaksudkan untuk menciptakan disparitas kedua etnis dimaksud, tetapi lebih pada unsur fakta yang ada.

Lampung merupakan daerah tujuan program pemerintah Orde Baru mengenai transmigrasi, sehingga menjadikan daerah ini sebagai daerah yang cukup heterogen, sehingga proses asimilasi pun berjalan baik. Hal tersebut dikarenakan orang Lampung memiliki prinsip *Nemui Nyimah* yaitu sifat yang selalu ramah dan baik kepada siapa pun.²¹ Akan tetapi hal tersebut yang pada akhirnya menjadikan identitas masyarakat Lampung sendiri tergerus akibat batasan-batasan etnis pribumi sedikit banyak telah berbaaur dengan etnis pendatang.

Kenyataan keanekaragaman suku maupun agama di Lampung menjadikan daerah ini memiliki potensi konflik yang tersembunyi. Konflik (etnis) yang terjadi di Lampung agak berbeda sedikit dengan daerah lainnya yang mayoritas berasal karena adanya diskriminasi terhadap etnis maupun agama tertentu, karena konflik yang pernah terjadi di Lampung lebih banyak terjadi akibat persoalan penonjolan identitas maupun pengeksklusifkasian terhadap etnis maupun agama tertentu. Sebut saja misalnya konflik yang terjadi pada November 2012 di Lampung Selatan antara etnis Lampung yang beragama Islam dengan etnis Bali yang beragama Hindu dikarenakan masalah komunikasi dan eksklusivitas Hindu Bali yang tidak mau membaaur dengan pihak lainnya sehingga memunculkan sikap arogansi terhadap etnis Lampung, dan sebaliknya suku Lampung sebagai “tuan rumah” merasa tidak dihargai oleh “tamu”.

Dalam konteks ini perlunya pemahaman secara integral dari kedua belah pihak akan adat istiadat serta tradisi juga budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal Lampung dalam hal ini harus menjadi pemahaman logika bersama yang perlu dikembangkan dan dijunjung tinggi secara bersama-sama, sebab jika “kaum pendatang” dapat memahami falsafah hidup masyarakat Lampung, maka tentu akan muncul sikap saling menghargai dan

²¹Sulistyawati Irianto, “Puil Pesenggiri; Modal Budaya dan Strategi Identitas Lampung”, dalam *Sosial Humaniora*, Vol. 15. No. 2, 2004, h. 144.

menghormati serta merasa memiliki dan terlibat dalam setiap kegiatan yang ada meskipun mereka bukan penduduk asli Lampung. Menurut penulis hal ini sangat penting, karena disamping hal tersebut sebagai sifat bawaan manusia yang berdimensi sosial, juga tuntutan aktualisasi dari sifat tersebut adalah “hidup bermasyarakat”. Sebaliknya, sebagai “tuan rumah” pada masyarakat asli Lampung akan muncul rasa dihormati dan dihargai, sehingga nilai-nilai luhur tersebut betul-betul dapat diaktualisasikan. Lebih jauh lagi, maka muncul suatu komunitas baru yang saling menghargai dan menghormati kearifan lokal sebagai milik bersama – meskipun memiliki latar belakang yang berbeda –, hingga pada akhirnya dapat bersama-sama pula membangun bumi Lampung. Hal ini perlu ditekankan – utamanya bagi masyarakat pendatang (etnis apa pun) – kiranya adat-istiadat daerah asal hendaknya tidak begitu mencolok dan ditonjolkan, baik berupa simbol-simbol tertentu maupun hal lainnya, bahkan diperlukan secara perlahan menyesuaikan dengan simbol-simbol atau ornamen khas daerah Lampung, seperti Tapis, Siger, batik Lampung serta penggunaan nama desa menjadi Pekon, menggunakan bahasa daerah Lampung sebagai alat komunikasi, paling tidak akan memunculkan rasa kepemilikan terhadap kekhasan Lampung. Kesemuanya itu akan melandasi terciptanya harmonisasi umat beragama yang berbasis kearifan lokal.

Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi penting dan akan bermanfaat hanya ketika masyarakat suatu daerah yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi secara apik. Sehingga setiap bagian kehidupan masyarakat lokal diorientasikan secara bijak berdasarkan sistem pengetahuan dan pengalaman mereka, yang tentu saja bukan cuma bermanfaat dalam kehidupan keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana alam, dimana semua kelompok masyarakat turut merasakan penderitaan kelompok lain kemudian ambil bagian (peduli) dalam mengatasi persoalan dan problema yang dihadapi oleh kelompok masyarakat lain.²²

²²Amien, *Kemandirian Lokal...*, h. 37.

Karenanya, menjadi penting untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di setiap daerah (termasuk di Lampung). Adapun diantara strategi yang patut dikembangkan dalam pelestarian kearifan lokal, diantaranya:

1. Menerapkan dan memberikan pendidikan dan pengajaran (baik secara formal maupun non-formal) tentang kearifan lokal kepada generasi muda sedini mungkin, agar generasi muda tertanam di hatinya rasa cinta, rasa memiliki dan rasa bangga terhadap kearifan lokal yang ada; Dalam hal ini kurikulum lokal (Mata Pelajaran Bahasa Daerah) yang selama ini telah berjalan di Sekolah-sekolah hendaknya terus disajikan dengan berbagai macam modifikasi baik dari segi materi maupun teknik pengajaran.
2. Bahwa upaya pengembangan budaya kearifan lokal sesungguhnya bukanlah kewajiban para pendidik saja, akan tetapi kewajiban semua pihak, baik itu Pemerintah, tokoh adat, maupun masyarakat.
3. Dibutuhkan suatu pengalaman yang panjang dengan cara pengamatan dan praktek secara langsung bagi setiap masyarakat agar pada gilirannya kearifan lokal dapat dipertahankan dari generasi ke generasi.

Upaya revitalisasi kearifan lokal masyarakat Lampung seharusnya menjadi proyek bersama seluruh elemen (pemerintah dan masyarakat) yang ada di Lampung serta menjadi paradigma berpikir bersama agar kearifan lokal yang dimiliki dapat “membumi” sehingga menjadi solusi dalam menciptakan perdamaian di Provinsi yang terkenal dengan sebutan *Sai Bumi Ruwa Jurai*.

E. Penutup

Setiap budaya memiliki kearifan tersendiri dalam menyiapkan permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk didalamnya bagaimana suatu kelompok atau komunitas tertentu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi atau yang sering disebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Lampung merupakan provinsi yang plural karena terdapat berbagai macam suku, agama, ras dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menyimpan potensi konflik cukup laten, bahkan jika tidak dikelola secara bijak dapat berujung pada dis-integrasi.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik adalah dengan menggunakan media kearifan lokal. Nilai-nilai luhur dan universal dalam sebuah kearifan lokal seperti *Piil Pesenggiri*

dan *Muakhi* dalam masyarakat Lampung sesungguhnya memiliki signifikansi untuk dikembangkan dalam lokus pemikiran “seluruh masyarakat Lampung”.

Adanya keanekaragaman jika tidak di *manage* sedemikian rupa, maka bisa menimbulkan problem tersendiri bagi wilayah ini. Oleh karena itu, Lampung sebagai wilayah yang plural (suku, agama, budaya, ras, golongan dan lain sebagainya), maka *mind set* yang harus melekat dalam setiap individu yang harus dikembangkan adalah budaya saling menghormati, menghargai, toleransi, persaudaraan dan gotong royong yang kesemuanya itu terangkum dalam kearifan lokal masyarakat Lampung. []

Daftar Pustaka

- Amien, *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Arifin, Samsul. *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-Isu Kontemporer*, Malang: UMM Press, 2009.
- Cooley, Frank L. *Mimbar dan Tahta*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Haba, John. "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso", dalam Irwan Abdullah dkk. (ed.), *Agama dan kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Irham, Muhammad Aqil. *Falsafah Piil Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global (Studi Hubungan Nilai-nilai Budaya dan Agama)*, Bandar Lampung: Puslit IAIN Raden Intan Lampung, 1997.
- Irianto, Sulistyowati. "Piil Pesenggiri; Modal Budaya dan Strategi Identitas Lampung", dalam *Sosial Humaniora*, Vol. 15. No. 2, 2004.
- Kurtz, Lester. *Gods in the Global Village*, California-London-New Delhi: Pine Forge Press, 1995.
- Mudzhar, M. Atho. "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama", dalam Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003.
- Nuridin, A. Fauzie. *Budaya Muakhi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Parson, Talcott. "Teori Sistem Umum: Suatu Gerakan ke Arah Kesatuan Teori Ilmu Perilaku", dalam Margareth M. Poloma (ed), *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ratnawati, *Pengkajian Nilai-Nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1992.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudjangi (Peny.), *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama; Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Agama, 1997.

Suyatno, Suyono. “Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan”, dalam [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa /artikel/1336](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1336)

Zarkasi, Ahmad. *Islam dan Budaya Lampung (Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal)*, Bandar Lampung: Aura Puslising, 2014.